

Bab II

KEADAAN POLITIK DAN EKONOMI CINA

Cina sebagai negara dengan populasi penduduk terbesar di dunia, telah memiliki perjalanan panjang tentang reformasi ekonomi dan sistem politiknya. Sebagai negara yang saat ini mempunyai kekuatan ekonomi dan jangkauan perdagangan yang luas tentunya telah melewati berbagai tahapan dan kebijakan dari masa ke masa. Peran seorang pemimpin dalam pembangunan ekonomi Cina sangat besar meskipun Cina dikenal sebagai negara ekonomi kapitalis. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa campur tangan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi tetaplah ada mengingat bahwa Cina merupakan negara komunis.

A. Kebijakan luar negeri Cina

Cina sebagai negara besar terus berupaya menerapkan kebijakan luar negeri yang bersifat mandiri dan menjunjung tinggi perdamaian. Tujuan dasar dari kebijakan luar negeri Cina adalah senantiasa menjaga kemerdekaan nasional dan kedaulatan negara, menciptakan lingkungan internasional yang menguntungkan untuk upaya reformasi, keterbukaan dan modernisasi, serta memelihara perdamaian dunia dan mempromosikan pembangunan umum.

Kebijakan-kebijakan luar negeri Cina didasarkan pada enam unsur utama sebagai berikut:¹⁸

- Unsur pertama adalah mempertahankan kemerdekaan dan kebebasan. Cina selalu berprinsip dalam urusan internasional untuk selalu menentukan posisinya sendiri dan kebijakan yang diambil dari setiap masalah harus mempunyai manfaat. Cina juga tidak pernah menyerah terhadap tekanan dari Negara-negara besar, juga tidak masuk ke dalam aliansi dengan kekuatan besar atau blok kekuasaan.
- Unsur yang kedua yaitu mempertahankan perdamaian dunia. China tidak mau berpartisipasi dalam perlombaan senjata, juga tidak mencari ekspansi militer. Cina dengan tegas menentang hegemonisme, politik kekuasaan, agresi dan ekspansi dalam bentuk apapun, serta pelanggaran batas yang dilakukan oleh suatu negara atas kedaulatan dan keutuhan wilayah negara lain, atau campur tangan dalam urusan internal negara lain dengan dalih etnis, agama atau masalah hak asasi manusia.
- Unsur ketiga yaitu Cina dengan tulus berharap untuk membangun dan mengembangkan hubungan persahabatan dan hubungan kerja sama dengan semua negara atas dasar Lima Prinsip Koeksistensi Damai (saling menghormati integritas wilayah dan kedaulatan masing-

¹⁸ Main Characteristics of China's Foreign Policy, Embassy of the People's Republic of China in the United States, <http://www.china-embassy.org/eng/>, akses pada 26 Maret 2012

masing negara, tidak saling menyerang, tidak saling ikut campur terhadap urusan internal masing-masing negara, prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, ko-eksistensi damai). Hubungan dengan negara-negara lain tidak pernah didasarkan pada sistem sosial atau ideologi

- Unsur keempat yaitu Cina dengan semangat menjalin hubungan persahabatan dengan negara-negara tetangga, bekerja keras untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional, dan selalu mempromosikan kerjasama ekonomi regional.
- Unsur kelima yaitu peningkatan persatuan dan kerjasama dengan negara-negara berkembang, Faktor ini selalu menjadi landasan kebijakan luar negeri Cina. Cina sangat mementingkan pengembangan hubungan persahabatan dan kerja sama yang komprehensif dengan negara-negara berkembang. Cina dengan penuh semangat mencari cara untuk melakukan kerjasama yang saling melengkapi dengan negara-negara berkembang dalam hal perdagangan ekonomi, ilmiah dan teknologi, dan telah memperluas dialog dan kerjasama dengan mereka pada isu-isu internasional untuk menjaga hak dan kepentingan dari semua negara berkembang.
- Unsur terakhir yaitu kebijakan pintu terbuka. Cina menerapkan kebijakan pintu terbuka baik untuk negara maju dan Negara berkembang dan telah terlibat dalam kerjasama internasional yang

luas atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan untuk mempromosikan pembangunan umum. Cina, sebagai negara besar dan sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, siap untuk melakukan upaya tak henti-hentinya untuk memastikan perdamaian dunia dan pengembangan, dan pembentukan tatanan politik dan ekonomi internasional baru yang adil dan merata berdasarkan perdamaian dan stabilitas.

Menurut Linda Jacobson dan Dean Knox dalam buku yang berjudul *New Foreign Policy Actors in China*, dijelaskan bahwa dalam proses pengambilan keputusan luar negeri Cina terdapat aktor-aktor utama yang terlibat dan aktor lain yang berusaha mempengaruhi dan menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri Cina. Adapun aktor-aktor utama yang terlibat dalam pembuatan kebijakan luar negeri Cina yaitu Partai Komunis Cina, Dewan Negara, dan Tentara Pembebasan Rakyat. Sedangkan aktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan luar negeri dari internal negara yaitu sektor bisnis, pemerintah daerah, para akademisi dan lembaga penelitian, dan media massa.

a) **Aktor-Aktor Utama Pembuat Kebijakan Luar Negeri Cina**
1. Partai Komunis Cina (PKC)

PKC adalah partai tunggal di Cina. Berdasarkan ideologi Marxisme-Leninist partai ini didirikan pada tanggal 1 Juli 1921 di Shanghai oleh Mao Tsetung. Sebagai partai tunggal, PKC merupakan alat pengontrol utama negara yang telah sah secara undang-undang.

Partai Komunis Cina adalah organisasi inti dari pembuatan kebijakan luar negeri di Cina. Namun, sebagian besar keputusan yang dibuat oleh PKC adalah sektor organisasi pemerintahan. Para kader PKC ini secara langsung telah diarahkan oleh petinggi organisasi partai dan terikat oleh disiplin yang memberikan kewenangan terhadap organisasi partai tunggal untuk menunjuk, mempromosikan dan memperhentikan pejabat pemerintah di setiap cabang administrasi negara.¹⁹

Badan pembuat kebijakan luar negeri tertinggi dari PKC adalah *Standing Committee of the Politburo of the Central Committee*, yang memiliki sembilan anggota, mayoritas dari mereka adalah perwakilan *ex-officio* dari organ fungsional pemerintah seperti perdana menteri dan Wakil eksekutif-Perdana Menteri Dewan Negara, Ketua Kongres Rakyat

¹⁹ Jeremy Paltiel, *Structure and Process in Chinese Foreign Policy: Implications for Canada*, China Papers no.8, Canadian International Council, www.canadianinternationalcouncil.org

Nasional, dan Ketua Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Cina.²⁰ Kunci pengambilan kebijakan luar negeri dan kebijakan keamanan harus secara resmi disetujui oleh PBSC (*Polithiro Standing Committee*).²¹

Sekretaris Jenderal dari PKC adalah presiden negara dan Ketua Komisi Militer Pusat. Sekretaris Jenderal adalah pejabat yang mempunyai dua tanggung jawab sekaligus yaitu kegiatan masyarakat Cina dan urusan militer. Pada posisi tersebut sekretaris jenderal PKC juga merupakan kepala *Foreign Affairs Leading Small Group* (FALG) yang mengkoordinasi dan mengarahkan kebijakan luar negeri bersama PKC dan menteri urusan luar negeri.²²

PKC ini bukan merupakan satu-satunya birokrasi yang bertugas dalam pembahasan dan pengambilan kebijakan luar negeri, karena terdapat badan lain dalam pengambilan keputusan luar negeri. Sebagian besar urusan pemerintah pusat dilakukan oleh Dewan Negara di bawah naungan perdana menteri.

Pada level atas, anggota partai komunis Cina adalah sumber kekuatan negara, maksudnya para petinggi negara adalah orang-orang yang juga menjadi kader PKC atau telah memiliki jabatan tinggi di

²⁰ Ibid

²¹ Ning Lu, *The Central Leadership, Supraministry Coordinating Bodies, State Council Ministries and Party Departments*, in: David M. Lampton (ed.), *The Making of Chinese Foreign and Security Policy in the Era of Reform*, Stanford: Stanford University Press, (2001), hlm 39-60.

²² Ibid Jeremy Paltiel

PKC. Para petinggi PKC biasanya akan menduduki jabatan tinggi di kursi pemerintahan. Bahkan dalam bidang militer, PKC telah membentuk badan yang bernama Komisi Militer Pusat (KMP) yang kedudukannya di atas Tentara Pembebasan Rakyat.

Pada level bawah, PKC bertugas mengontrol jalannya kegiatan masyarakat sipil. Kebebasan masyarakat untuk mengemukakan pendapat atas kinerja partai maupun pemerintah sangat dibatasi bahkan dilarang. Segala bentuk organisasi kemasyarakatan atau perserikatan juga di bawah pengawasan PKC. Masyarakat Cina memiliki hambatan untuk mendapatkan akses informasi dari luar, hal ini karena semua berita yang masuk ke Cina akan melalui penyaringan partai. Dalam mengekspresikan diri melalui jejaring sosial atau tulisanpun masyarakat sangat dibatasi oleh pemerintah melalui pengawasan PKC.

2. Dewan Negara

Dewan Negara adalah badan eksekutif pemerintah pusat pemerintah Cina. Dewan Negara ini dipimpin oleh Perdana Menteri, dibantu oleh Wakil Perdana Menteri dan Anggota Dewan Negara. Dewan Negara memiliki 28 kementerian dan beberapa komisi di bawahnya. Badan ini melakukan pertemuan mingguan²³

²³ Ibid Jeremy Paltiel

Perdana menteri dari Dewan Negara yang dinominasikan oleh presiden, ditinjau oleh NPC, dan diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Anggota lain dari Dewan Negara dinominasikan oleh perdana menteri, ditinjau oleh NPC atau Komite Tetap, dan diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Di Dewan Negara, setiap anggota memiliki masa jabatan lima tahun, dan tidak dapat diangkat kembali setelah dua periode yang berurutan.²⁴

Dewan Negara bertanggung jawab untuk melaksanakan prinsip-prinsip dan kebijakan-kebijakan Partai Komunis China serta peraturan dan hukum yang diadopsi oleh NPC, dan berurusan dengan urusan seperti politik internal Cina, diplomasi, pertahanan nasional, keuangan, ekonomi, budaya dan pendidikan.²⁵

Kementrian Urusan Luar Negeri

Peran dan pentingnya kementrian luar negeri sebagai pembuat kebijakan luar negeri telah berubah selama dekade terakhir. Terdapat alasan tentang menurunnya peran kementrian luar negeri, yaitu semakin meluasnya peran Cina di arena internasional dan semakin rumitnya masalah-masalah global mengakibatkan bertambahnya entitas pengambilan kebijakan luar negeri. Kementrian luar negeri

²⁴ Xinhua, The State Council, http://english.gov.cn/2005-08/05/content_20763.htm

²⁵ *ibid*

sering bergantung pada lembaga lain dalam keahlian mengambil kebijakan luar negeri, sementara pada saat yang sama mereka harus bersaing untuk tetap berpengaruh dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri.²⁶

Sementara pimpinan senior PKC yang bertanggung jawab untuk keputusan penting yang mempengaruhi hubungan Cina dengan negara besar atau negara-negara penting di kawasan, telah didelegasikan untuk mengontrol keseluruhan pelaksanaan kebijakan luar negeri untuk kementerian luar negeri. Seorang direktur dari sebuah lembaga riset mencatat bahwa 'kementerian luar negeri hanyalah manajer, mereka tidak membuat kebijakan, mereka hanya menerapkannya. Dalam negosiasi internasional, kementerian luar negeri secara tradisional menjadi organisasi utama meskipun kementerian lain mungkin telah memberikan keahlian pada isu tertentu yang sedang dibahas.

²⁶ Linda Jakobson And Dean Knox, *New Foreign Policy Actors In China*, SIPRI Policy Paper No. 26, Stockholm International Peace Research Institute, 2010, Hlm 8

3. Tentara Pembebasan Rakyat (The People's Liberation Army)

Tentara Pembebasan Rakyat merupakan kesatuan organisasi angkatan darat laut, dan angkatan udara Cina. Ini adalah salah satu kekuatan militer terbesar di dunia.²⁷ Tentara pembebasan rakyat saat ini memiliki 2,3 juta personil, terdiri dari dua komponen yaitu komponen aktif dan komponen cadangan. Komponen aktif dari Tentara Pembebasan Rakyat adalah tentara tetap di negara itu, yang terutama melakukan tugas operasi militer defensif dan membantu menjaga ketertiban sosial sesuai dengan hukum. Struktur dasar organisasi dapat dikategorikan ke dalam markas umum / departemen, pelayanan dan persenjataan, dan komando militer daerah.²⁸

Tentara Pembebasan Rakyat secara historis memiliki peran dalam pembuatan kebijakan luar negeri Cina, akan tetapi saat ini perannya semakin berkurang dan lebih difokuskan pada profesionalisasi angkatan bersenjata dan menjauhkan para pemimpin militer dari proses pengambilan keputusan sipil.²⁹

²⁷ People's Liberation Army, <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/450626/Peoples-Liberation-Army>

²⁸ People's Liberation Army, <http://www.globalsecurity.org/military/world/china/pla.htm>

²⁹ Li, N., *Chinese Civil-Military Relations in the Post-Deng Era: Implications for Crisis Management and Naval Modernization*, China Maritime Studies, no. 4 (US Naval War College: Newport, RI, 2010)

Tentara pembebasan rakyat memberikan otoritas dengan pemerintah dan entitas komersial pada keputusan yang berkaitan dengan pengawasan senjata dan bidang non-proliferasi secara langsung. Sebelumnya Tentara Pembebasan Rakyat menjalankan otoritas di bidang ini. TPR saat ini masih memegang kekuasaan dalam bidang pertahanan yang terkait dalam isu-isu kebijakan luar negeri, khususnya yang berkaitan dengan senjata strategis dan sengketa teritorial. Secara khusus, TPR adalah pendukung setia garis keras terhadap Taiwan.³⁰

Kebijakan pertahanan dan militer ini juga diawasi oleh PKC. Komisi Militer Pusat bertanggung jawab atas perintah terpadu angkatan bersenjata Cina, dengan kata lain TPR masih mempunyai jalur penting untuk mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan luar negeri. TPR juga dapat memasukkan dirinya ke dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri melalui *Leading Small Group*, meskipun efektivitas dalam kelompok ini pertanyakan.

Profesionalisasi TPR telah membuat pihak militer tidak enggan untuk melibatkannya dalam debat publik maupun kebijakan luar negeri sehingga memunculkan kelompok penekan TPR monolitik

³⁰ D. M. Lampton, *The Making of Chinese Foreign and Security Policy in the Era of Reform, 1978-2000* (Stanford University Press: Stanford, CA, 2001), hlm. 257-88

dalam isu-isu kebijakan luar negeri Cina.³¹ Dalam beberapa tahun terakhir, TPR semakin berusaha untuk mempengaruhi debat publik tentang masalah keamanan nasional dengan menyebarkan analisis publik melalui lembaga penelitian TPR. TPR juga secara aktif menjalin hubungan dengan para peneliti sipil dengan memungkinkan petugas untuk berpartisipasi dalam debat di lembaga penelitian sipil dan mengundang peneliti sipil untuk kuliah dan berpartisipasi dalam kegiatan lokakarya TPR.³²

b.) Aktor Lain Dalam Pembuatan Kebijakan Luar Negeri

Selain aktor utama pembuat kebijakan luar negeri Cina, ada sejumlah aktor lain yang berusaha untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan luar negeri Cina. Aktor-aktor tersebut bermain di luar area resmi proses pengambilan kebijakan luar negeri Cina. Aktor-aktor tersebut meliputi BUMN, lembaga keuangan, perusahaan energy, pemerintah daerah, lembaga penelitian, dan media massa.³³

1) Sektor bisnis

Sektor bisnis merupakan hal yang sangat dipertimbangkan oleh pemerintah sebelum melakukan tindakan politik luar negeri. Sektor

³¹ Mulvenon, J. C., *Professionalization of the Senior Chinese Officer Corps: Trends and Implications* (RAND: Santa Monica, CA, 1997), hlm 76-77

³² Ibid Jakobson And Knox Hlm 14

³³ Ibid Jakobson And Knox Hlm 24

bisnis ini dianggap penting karena merupakan salah satu poros perputaran kemajuan Cina. Sektor bisnis sendiri terdapat beberapa bagian antara lain BUMN, institusi keuangan, dan perusahaan-perusahaan energi³⁴.

BUMN merupakan salah satu hal yang menjadi banyak pertimbangan dalam melakukan perumusan kebijakan luar negeri Cina. Meskipun BUMN tidak terlibat dalam pembuatan kebijakan secara resmi, namun peran perusahaan dan BUMN sangat memiliki arti penting bagi pemerintah Cina karena dianggap sebagai salah satu penggerak ekonomi negara.

Mengingat sebagian besar hubungan kerjasama luar negeri Cina adalah dalam bidang ekonomi dan perdagangan, maka hampir semua kebijakan luar negeri harus mempertimbangkan pihak BUMN dan perusahaan-perusahaan swasta. Cina bergantung pada keterlibatan sektor komersil untuk memajukan kebijakan luar negeri yang lebih luas. Hal ini juga termasuk dalam kepentingan Cina untuk memperluas perusahaan di luar negeri.

BUMN yang beroperasi secara besar berada dibawah naungan pemerintah pusat dan cenderung memiliki hubungan yang erat

³⁴ Ibid Jakobson And Knox Hlm 24

dengan para elit politik Cina, khususnya perusahaan-perusahaan industri strategis seperti minyak bumi, mineral, tenaga nuklir dan pertahanan. Biasanya para pemimpin BUMN dan juga pemimpin perusahaan memiliki simbiosis mutualisme dengan para pemimpin politik. Pada saat kebijakan dibuat tidak terlihat jelas siapakah sebenarnya yang memiliki kepentingan paling banyak.

Di satu sisi, BUMN berada di bawah otoritas politik, karena setidaknya menurut teori mereka harus meminta persetujuan dari pemerintah jika ingin melakukan investasi dalam skala besar ke luar negeri. BUMN pada tingkat level eksekutif yang berada di bawah pemerintah pusat seperti *China National Petroleum Corporation* (CNPC) dan *Baosteel* (perusahaan baja terbesar Cina), diangkat oleh organisasi departemen PKC. Di sisi lain, pemimpin politik juga tergantung pada suksesnya BUMN. BUMN merupakan entitas kaya yang memperkerjakan ratusan ribu orang dan memberikan seperenam dari total pendapatan BUMN tersebut untuk negara.

Di samping BUMN sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan, juga terdapat dua instansi penting yang sangat diperhatikan oleh pemerintah Cina dan telah memberi banyak

pertimbangan terhadap proses pengambilan kebijakan luar negeri yaitu institusi keuangan dan perusahaan energi.

Dua lembaga besar bidang keuangan yang dilindungi dan dikuasai pemerintah Cina adalah Bank Ekspor-Impor China (Eximbank) dan *China Development Bank* (CDB). Kedua lembaga tersebut memainkan kunci penting dalam mendukung perluasan bisnis Cina ke luar negeri. Eximbank bertugas memperluas perdagangan Cina, dan CDB berupaya untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan infrastruktur Cina.³⁵ Kedua elemen tersebut merupakan pendukung utama dalam kegiatan ekonomi Cina di luar negeri yang di pegang oleh Eximbank dan CDB bersandar kepada proyek-proyek infrastruktur dan eksplorasi sumber daya, dan terus memberikan dorongan penting untuk perusahaan minyak China, mineral, kontraktor dan telekomunikasi.³⁶

Perusahaan-perusahaan energy Cina seperti Industri minyak bumi Cina telah mempengaruhi kebijakan luar negeri di sejumlah kasus dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, *China National Offshore Oil Corporation* (CNOOC) telah memainkan peran utama dalam perselisihan teritorial Cina dengan negara-negara Asia

³⁵ China Eximbank, 'The Export-Import Bank of China', <<http://english.eximbank.gov.cn/profile/intro.shtml>>; and CDB, 'Strategic focus', <<http://www.cdb.com.cn/english/Column.asp?ColumnId=109>>.

³⁶ Ibid Jakobson And Knox Hlm 28

Tenggara dari Kepulauan Spratly dan permasalahan dengan Jepang di Timur Laut Cina, kedua tempat tersebut memiliki ladang minyak dan gas yang belum dieksplorasi.

Terkadang kegiatan perusahaan-perusahaan energi Cina memiliki tujuan yang berbeda dengan tujuan nasional. Selain CNOOC juga terdapat perusahaan energi lain yaitu *China National Nuclear Corporation (CNPC)* dan *Sinopec* yang memiliki andil dalam penanaman investasi di luar negeri. Namun tindakan perusahaan-perusahaan tersebut agak keluar dari tujuan nasional Cina. Sebagai contoh CNPC dan Sinopec telah berinvestasi di Sudan. Hal tersebut telah memicu tuduhan oleh pemerintah Barat dan organisasi hak asasi manusia internasional bahwa China menopang Pemerintah Sudan, yang dituduh tidak melakukan upaya bersama untuk menghentikan kekejaman di Darfur.³⁷

2) Pemerintah Daerah

Peran pemerintah daerah dalam usaha memajukan ekonomi lokal sangat dibutuhkan. Kerjasama perusahaan-perusahaan ekonomi dan teknologi internasional (IETCCs) yang dioperasikan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi lokal

³⁷Ibid Jakobson And Knox Hlm 29

sangat terlibat dalam kontrak luar negeri dan ekspor tenaga kerja. Sebagian besar pendapatan mereka berasal dari proyek-proyek luar negeri, dan mereka sering didanai oleh pinjaman lunak Cina, yang sering terkait dengan kontrak pembangunan dan melibatkan pembangunan infrastruktur.³⁸

Para Pemimpin nasional sadar akan kebutuhan untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kegiatan eksternal Beijing terus mendukung, bukan merusak, prioritas domestik Cina. Para pemerintah daerah memiliki akses untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan pusat yaitu melalui PKC tingkat atas. Biasanya pemimpin daerah memegang dua dari Sembilan kursi PBSC dan sepuluh dari 25 kursi politburo. Pemimpin daerah juga terkadang menggunakan posisi mereka di komisi pusat PKC, Kongres Rakyat Nasional (parlemen Cina) dan Konferensi Politik Permusyawaratan Rakyat China (sebuah badan penasehat politik) untuk membentuk perdebatan dalam isu kebijakan luar negeri.

Melalui pengembangan hubungan ekonomi dan budaya, pemerintah daerah cenderung mendorong kebijakan luar negeri Cina

³⁸ China Heilongjiang International Economic & Technical Cooperative Corporation, http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1378

ke arah peningkatan integrasi internasional. Pemerintah daerah, khususnya provinsi perbatasan dan pesisir, memiliki kepentingan dalam liberalisasi ekonomi, termasuk penurunan hambatan perdagangan dan promosi investasi asing langsung.

Provinsi Guangxi Selatan, khususnya telah berada di garis depan pengembangan hubungan ekonomi dengan Asia Tenggara. Ibu kota Guanxi yang disebut Nanning, telah dibangun sebuah sistem lembaga ekspansif yang ditujukan untuk mempromosikan perdagangan lintas batas dengan Asosiasi Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), termasuk *China-ASEAN Expo*, bisnis internasional kabupaten, zona ekonomi dan area logistik.³⁹

3) Media Massa

Peran opini publik dalam membentuk kebijakan luar negeri Cina merupakan fenomena hangat yang sering diperdebatkan baik di dalam dan luar Cina. Meskipun ada banyak kasus di mana opini publik terbukti memiliki dampak langsung terhadap kebijakan dalam negeri, ternyata juga di bidang kebijakan luar negeri. Bukan hanya itu, saat ini semakin jelas bahwa media massa Cina dan komunitas

³⁹ Lihat Jakobson And Knox Film 33

online Cina mempunyai kelompok yang berusaha untuk mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri.

Kedua revolusi media yang telah terjadi di Cina selama 30 tahun terakhir dan penyebaran penggunaan Internet di kalangan masyarakat Cina selama dekade terakhir telah mengubah cara secara substansial di mana warga Cina dan pejabat berkomunikasi secara umum. Hal ini juga menghasilkan dua perubahan yang nyata terkait dengan diskusi publik tentang isu-isu kebijakan luar negeri.

Perubahan pertama adalah berkaitan dengan keragaman analisis terhadap masyarakat Cina, kecepatan berita yang beredar di Cina dan sejauh mana orang Cina mampu untuk mengekspresikan mereka mengenai isu-isu kebijakan luar negeri. Perubahan kedua adalah sifat komunikasi yang dinamis. Sebelumnya, media adalah alat yang tersedia secara eksklusif untuk para pejabat. Sekarang, dengan munculnya Internet, kelompok kepentingan dan warga juga dapat memanfaatkan media dan internet untuk mempengaruhi opini publik serta satu sama lain.

B. Ekonomi Cina dan Sumber Daya Energi

Sejak dimulainya reformasi ekonomi pada tahun 1979, Cina telah menjadi salah satu negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Dari tahun 1979 hingga tahun 2011 produk domestik bruto (PDB) Cina rata-rata tumbuh pertahunnya sebesar hampir 10%.⁴⁰

Pertumbuhan ekonomi Cina dimulai ketika Deng Xiaoping mengeluarkan kebijakan perombakan tata ekonomi RRC. Gagasan perombakan ini dituangkan dalam gagasan empat bentuk modernisasi RRC. Empat bentuk modernisasi ini mencakup bidang pertanian, industri, iptek, dan militer.

Gagasan empat bentuk modernisasi tersebut dikemukakan pada sidang pleno ketiga kongres Sentral Komite ke-XI Partai Komunis Cina (PKC) pada tahun 1978. Deng Xiaoping mengharuskan RRC ke arah modernisasi yang dimaksudkan agar RRC tumbuh menjadi kekuatan ekonomi baru. Untuk mencapai tujuan tersebut, Deng Xiaoping harus memikirkan kendala sekaligus membentuk *nomenklatura*. Nomenklatura ini adalah sebuah sarana untuk melaksanakan konsolidasi dengan mengangkat politbiro yang baru sebanyak enam orang dan tidak seorangpun di antaranya merupakan seorang militer.⁴¹

⁴⁰ Wayne M. Morrison, *China's Economic Conditions*, CRS report for congress, 2008, hlm 1

⁴¹ <http://leoa56fkipuns.wordpress.com/2010/10/23/15/>

a. Reformasi Ekonomi Oleh Deng Xiaoping

Konsep reformasi ekonomi Cina oleh Deng Xiaoping telah membawa pengaruh besar bagi kemajuan ekonomi Cina. System ekonomi telah dirubah menjadi system ekonomi kekuatan pasar. Dalam hal ini, proses transaksi secara penuh dikelola oleh pasar. Dengan demikian perusahaan-perusahaan swasta dengan sendirinya tumbuh dan saling bersaing untuk dapat menembus pasar internasional. Adapun reformasi yang dicanangkan oleh Deng Xiaoping adalah sebagai berikut :

1. Penghapusan Monopoli Negara

Pemerintah RRC telah melakukan berbagai pembenahan di segala sector sebagai upaya mensukseskan perubahan di Cina, salah satunya adalah dengan dikeluarkannya kebijakan RRC untuk menghapus pembelian hasil panen dengan system monopoli Negara.⁴²

Kebijakan tersebut telah menjadi langkah baru dalam memperbaiki system ekonomi pedesaan yang dahulunya dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah Cina. Dengan adanya kebijakan ini, maka rakyat memiliki hak utuh untuk dapat menjual hasil panennya ke pasar bebas dengan menentukan harga hasil panennya berdasarkan penyesuaian terhadap system pasar.

Penghapusan monopoli negara dan pemberlakuan mekanisme pasar, di mana harga barang-barang kini tidak ditetapkan oleh

⁴² Xinhua, lihat "RRC Hapuskan Monopoli Pertanian", Kompas, 3 Januari 1987 hlm 7.

pemerintah, tetapi diserahkan pada kekuatan tarik-menarik antara besarnya jumlah permintaan dengan besarnya jumlah penawaran yang beredar di masyarakat, pertama kali di kemukakan pemerintah RRC dalam sidang pleno ke-3 komite sentral PKC XII, tanggal 20 Oktober 1984.⁴³

Semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentu menuai kekhawatiran akan adanya kegagalan dalam pelaksanaannya. Begitu juga dengan kebijakan pengurangan monopoli Negara ini, pemerintah Cina khawatir akan terjadi kenaikan barang-barang hasil pertanian jika control harga tidak lagi dipegang oleh pemerintah.

Pemerintah juga khawatir apabila kenaikan harga barang-barang dipasar akan membawa dampak buruk terhadap perekonomian nasional, hal ini disebabkan bahwa ekonomi pasar di RRC belum melembaga. Di samping itu, selama ini perekonomian Cina telah terbiasa dengan system pengelolaan yang tersentralisasi.

2. Liberalisasi Usaha Dan Manajemen

Di bulan November 1981, PM Zhao menyampaikan rancangan kerja pemerintah kepada parlemen (kongres rakyat nasional), rancangan kerja pemerintah itu berupa 10 petunjuk pembangunan ekonomi RRC yang isinya :⁴⁴

⁴³ *Tantangan Pembaruan Ekonomi* 5 Januari 1985, *Kompas*, Hlm. 4

⁴⁴ Poltak Partogi, *Reformasi Ekonomi RRC Era Deng Xiaoping*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995, Hlm 147

- 1) Pemerintah ingin mempercepat pembangunan pertanian dengan menggunakan kebijakan yang tepat dan pemikiran yang ilmiah.
- 2) Pemerintah memberikan perhatian terhadap pembangunan industri barang-barang konsumsi dan mengatur orientasi pembangunan industri berat
- 3) Pemerintah meningkatkan rasio penggunaan energi dan transportasi
- 4) Pemerintah mengadakan transformasi teknik setahap dalam unit-unit kunci, dan menjalankan penggunaan yang maksimal terhadap perusahaan-perusahaan yang ada.
- 5) Pemerintah melakukan konsolidasi di segala bidang dan penstrukturan kembali perusahaan-perusahaan menurut kelompoknya.
- 6) Pemerintah meningkatkan dana-dana pembangunan dan menggunakannya secara hemat, melalui perbaikan metode persyaratan, akumulasi dan pengeluaran
- 7) Pemerintah tetap melaksanakan kebijakan pintu terbuka dan meningkatkan kemampuan untuk berdikari
- 8) Pemerintah dengan aktif melakukan reformasi ekonomi negara dan memperlihatkan inisiatif dalam setiap hal yang berkaitan dengan usaha ini.

- 9) Pemerintah berupaya mempertinggi taraf keilmuan dan kebudayaan seluruh rakyat pekerja dan mengorganisasikan kemampuan untuk menjalankan proyek-proyek penelitian ilmiah yang penting
- 10) Pemerintah berusaha mewujudkan konsep segalanya ditunjukkan untuk rakyat dan memberikan perhatian menyeluruh terhadap produksi, pembangunan dan penghidupan rakyat.

Rancangan kerja pemerintah diatas merupakan petunjuk perubahan kebijakan di RRC, di mana struktur ekonomi yang rasional berusaha dibangun oleh pemerintah Deng, dengan menggunakan cara-cara yang intensif, seperti pembaruan sistem manajemen, pemakaian ilmu dan teknologi canggih, pembaruan di bidang keuangan, introduksi pentingnya peranan bank, rasionalisasi produksi, aplikasi disiplin pekerja yang lebih baik, implementasi cara pembayaran upah yang lebih baik, dan sebagainya.

Rasionalisasi ekonomi RRC yang dilakukan setelah Deng mempunyai kekuasaan yang baik, menurut keterangan pemerintah, telah memperlihatkan perkembangan yang positif, terutama di sektor pertanian, di mana terjadi peningkatan yang besar. Karena reformasi di pedesaan membawa hasil yang baik, pemerintah tergerak

inisiatifnya untuk melakukan reformasi ekonomi di wilayah perkotaan.

Dalam sidang PKC XII, pemerintah menetapkan kebijakan mengenai perombakan struktur ekonomi ekonomi perkotaan, khususnya menyangkut kehidupan sistem ekonomi modern. Dalam perombakan itu pemerintah memberikan pelonggaran ikatan akibat perencanaan yang terlalu ketat, memperbaiki struktur gaji dan mendesentralisasi kekuatan ekonomi di tingkat perusahaan-perusahaan. Sementara perusahaan-perusahaan ini sendiri menjadi kesatuan ekonomi yang merdeka dengan status hukum seperti di barat, di mana para manajernya mempunyai hak otonomi yang lebih luas.

3. Pembukaan Diri Terhadap Modal Asing

Semenjak tahun 1979, pemerintah RRC melaksanakan kebijakan pintu terbuka yaitu kebijakan di mana setiap daerah yang telah di berikan otonomi khusus dari pemerintah dapat mengundang atau mengelola modal asing. Empat wilayah di RRC, yaitu Shenzhen, Shuhai, Shantou Dan Xianmen, dibuka sebagai kawasan ekonomi luar biasa. Sedangkan empat belas kota di sepanjang pantai, yakni Dalian, Oinghuangdao, Tianjing, Yantai, Qindao, Lianyungang, Nanton, Shanghai, Ningbo, Wenzhou, Funzhou, Qungzhou, Shangjiang, dan Deihai, bersama-sama dengan pulau Hainan di

tetapkan sebagai “kota-kota bebas” yang setaraf kedudukannya dengan kawasan ekonomi luar biasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wilayah sepanjang pantai utara hingga pantai selatan RRC, telah di buka lebar-lebar bagi dunia luar oleh pemerintah RRC, dengan pelimpahan hak otonomi yang luas terhadap modal asing.⁴⁵

Akibat kebijakan tersebut, negara Cina mengalami pertumbuhan investasi yang cukup tajam dan berdampak sangat baik bagi roda perekonomian di Cina sendiri. Pada tahun 1981, penanaman modal asing di Cina mencapai US\$ 1, 22 milyar. Sebagian besar dari jumlah ini ditanamkan dalam bentuk proyek-proyek produksi patungan di keempat kawasan ekonomi luar biasa. Dalam proyek-proyek tersebut, biasanya pihak asing menyediakan seluruh modal. Peralatan dan teknologi, sedangkan pihak RRC menyediakan tanah bangunan pabrik dan unsur tenaga kerja.

Perdagangan dan investasi asing terus memainkan peran utama dalam peningkatan ekonomi Cina. Pada tahun 2004 sampai tahun 2007, nilai perdagangan barang Cina hampir mencapai dua kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2007, ekspor Cina mencapai \$1.218 miliar, nilai ini melampaui ekspor AS yang pada waktu itu sebesar \$ 1.162 miliar. Sedangkan impor Cina sebesar \$956 juta, dan surplus

⁴⁵ Ibid hlm 152

perdagangannya adalah sebesar \$ 262 juta. Ini merupakan nilai yang sangat tinggi dalam sejarah ekonomi Cina.

Lebih dari setengah perdagangan Cina tersebut dilakukan oleh perusahaan asing yang beroperasi di Cina. Jadi, hasil kombinasi dari surplus perdagangan, arus investasi langsung, dan pembelian mata uang asing dalam skala besar, telah membuat Cina menjadi pemegang cadangan devisa terbesar di dunia yaitu mencapai \$ 1.5 triliun pada akhir tahun 2007.⁴⁶

b. Pertumbuhan Ekonomi Cina

Mulai tahun 1979, Cina meluncurkan beberapa reformasi ekonomi. Pemerintah Cina memberikan hak untuk petani agar mereka mampu menjual hasil tanaman mereka ke pasar bebas. Selain itu pemerintah juga menetapkan empat zona ekonomi khusus yang bertujuan untuk menarik investasi asing, meningkatkan ekspor, dan membuka impor produk teknologi ke Cina.

Salah satu reformasi ekonomi Cina yaitu melakukan desentralisasi dalam hal pembuatan kebijakan ekonomi. Dalam hal ini, control ekonomi dari berbagai perusahaan diberikan kepada pemerintah provinsi dan daerah. Hak otonomi mengenai ekonomi terutama perdagangan dipegang langsung oleh pemerintah daerah

⁴⁶ Lihat Wayne M. Morrison, hlm 2

untuk memberikan izin kepada para ekonom dalam beroperasi dan bersaing sesuai dengan prinsip-prinsip pasar bebas.

Di samping itu, wilayah pesisir dan kota ditetapkan sebagai daerah terbuka dan dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan pasar bebas. Untuk wilayah pesisir dan kota ini diberikan insentif khusus dalam hal pajak agar menarik para investor asing agar mau menanamkan modal di Cina.⁴⁷ Sejak reformasi ekonomi Cina dimulai, pertumbuhan ekonomi secara riil telah meningkat 14 kali lipat, dan PDB perkapita secara riil juga naik 10 kali lipat.

Para ekonom telah menganalisis hal-hal yang mempengaruhi pesatnya pertumbuhan ekonomi Cina. Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Cina. Faktor pertama yaitu modal dan investasi dalam skala besar. Modal dan investasi tersebut didapat dari tabungan domestic dan penanaman investasi asing. Faktor kedua adalah produktifitas barang dan jasa yang tumbuh dengan cepat. Kedua faktor ini telah dijalankan bersama-sama dengan seimbang dan berkesinambungan. Reformasi ekonomi Cina menyebabkan efisiensi yang lebih tinggi dalam perekonomian.

Beberapa ekonom telah menyimpulkan bahwa keuntungan produktivitas (yaitu, peningkatan efisiensi) telah menjadi faktor utama dalam pertumbuhan pesat ekonomi China. Peningkatan produktivitas

⁴⁷ Ibid hlm 2

disebabkan sebagian besar oleh realokasi sumber daya untuk penggunaan yang lebih produktif, terutama di sektor-sektor yang sebelumnya sangat dikendalikan oleh pemerintah pusat, seperti pertanian, perdagangan, dan jasa. Misalnya, reformasi pertanian meningkatkan produksi, membebaskan pekerja untuk mengejar pekerjaan di sektor manufaktur yang lebih produktif.

Desentralisasi ekonomi Cina menyebabkan munculnya non-BUMN (seperti perusahaan swasta), yang cenderung untuk mengejar kegiatan yang lebih produktif daripada BUMN yang dikontrol oleh pusat dan lebih berorientasi pasar, dan karenanya, lebih efisien. Selain itu, terutama sektor ekspor terkena kekuatan kompetitif. Pemerintah daerah dan provinsi diizinkan untuk mendirikan dan mengoperasikan berbagai perusahaan pada prinsip-prinsip pasar, tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Selain itu, investasi langsung asing (FDI) di Cina membawa serta teknologi baru dan proses yang meningkatkan efisiensi.⁴⁸

⁴⁸ Lihat Wayne M. Morrison, hlm 9